

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016 -2021**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016 -2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Gedung Kembar B Lantai 2
Telp. 0541-6667155, 0541-6667164 Fax. 0541-6667155
Email : bkpkakar@yahoo.co.id, Website : bkpp.kutaikartanegara.com
TENGGARONG, 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 050/ 009 /SK/SEK-DKP**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 telah ditetapkan, maka bagi setiap Instansi Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing SKPD.
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu adanya perubahan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

3. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021,.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2016-sampai dengan 2021.

- KEDUA : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 April 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DR. HAIRIL ANWAR, MS.
NIP. 19600321 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur di panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga telah selesainya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka mendukung RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021..

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi informasi dan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016 - 2021

Kami mengharapkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan pedoman, acuan dan arah Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 10 Desember 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



IR. HAIRIL ANWAR, MSi
NIP. 19640371 198802 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Struktur Organisasi	9
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	20
2.5. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	32
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Identifikasi Permasalahan	41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra BKPP Provinsi.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	52
3.5. Penentuan Lingkungan Strategis	54
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	57
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	57
V. STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	64
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
VIII. PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel.		Hal.
2.1.	ASN Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 Berdasarkan Pangkat dan Tingkat Pendidikan.....	16
2.2.	Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	19
2.3.	Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	19
2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.5.	Data Ketersediaan pangan (beras) dari sumber produksi kabupaten Kutai Kartanegara.....	23
2.6.	Data Ketersediaan pangan (jagung) dari sumber produksi kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
2.7.	Data Ketersediaan pangan (kedelai) dari sumber produksi kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
2.8.	Data Ketersediaan pangan (ubi kayu) dari sumber produksi kabupaten Kutai Kartanegara.....	25
2.9.	Data Ketersediaan pangan (ubi jalar) dari sumber produksi kab. Kutai kartanegara.....	26
2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Daerah.....	42
3.2.	Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	54
4.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	63
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	65
7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar.		Hal.
2.1.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	9
2.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian.....	15
2.3.	Komposisi THL-D Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
2.4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender.....	17

BAB. I**PENDAHULUAN****1.1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan Perangkat Daerah yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, serta mengacu pada Pembangunan Nasional di Bidang Ketahanan Pangan seperti yang tercantum dalam Dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 2019. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara,

sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di bidang ketahanan pangan dengan menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi social ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Penyusunan perubahan Renstra di latar belakang oleh perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021. Dengan dasar hukum Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan untuk proses perubahan diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, kebijakan dan program-program pembangunan ketahanan pangan serta penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 -2021. Selain itu juga untuk memberikan arah kepada Perangkat Daerah dalam menjalankan berbagai Program dan Kegiatan untuk Jangka Waktu Lima Tahun (Tahun 2016 – 2021) .

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam kurun waktu 2016-2021;
- b. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan; dan
- c. Sebagai tolok ukur/ acuan untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan pimpinan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 terdiri dari 8 (Delapan) bab, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Pembangunan Pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar. Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Ketahanan Pangan diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

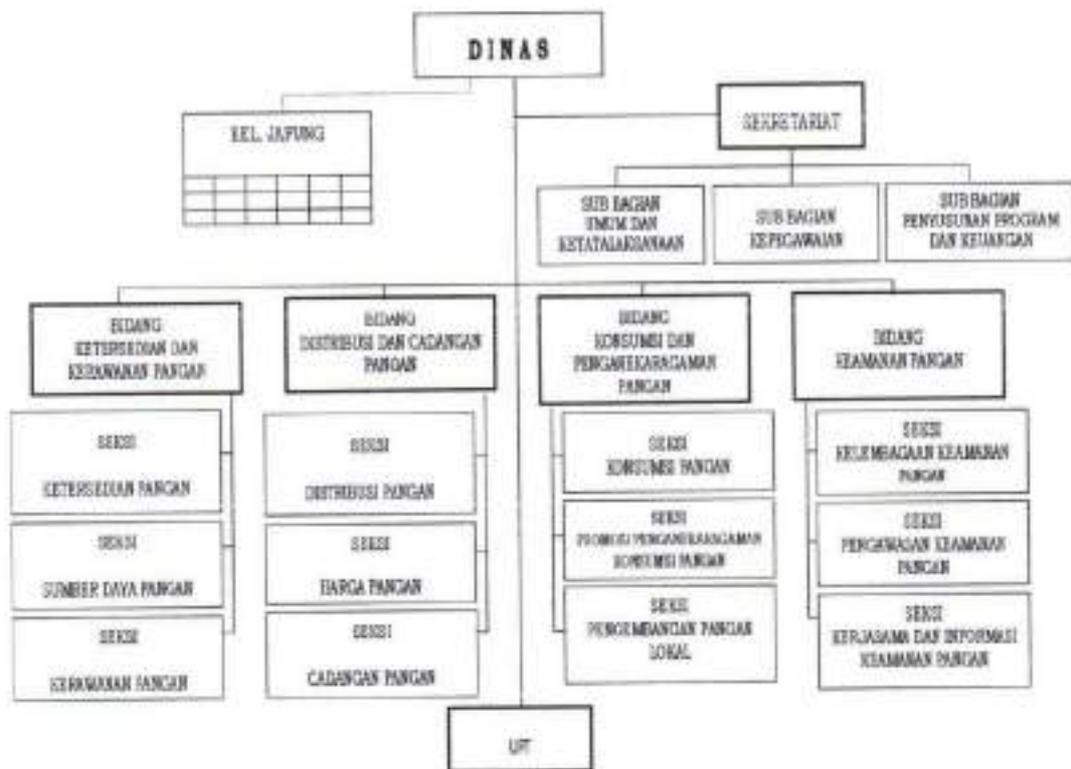
Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan pangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan pangan;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, maka Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Masing-masing Bidang dan Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. *Sekretaris*

- 1) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- 6) mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- 7) mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- 8) mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah

membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

- 9) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
- 11) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Dinas; dan
- 12) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

b. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur Pangan dan Sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan lainnya serta Penanganan Kerawanan Pangan;
- 4) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- 5) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- 6) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
- 7) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

c. Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat dari menurunnya ketersediaan pangan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan monitoring Cadangan Pangan masyarakat;
- 4) mengkoordinasikan kegiatan penanganan dan penyaluran pangan untuk masyarakat rawan pangan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan rapat koordinasi untuk proses penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan mengusulkan pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan Kabupaten melalui pengembangan jaringan pasar melalui perumusan serta sosialisasi pola-pola distribusi, kemitraan, kelembagaan dan sarana prasarana distribusi untuk meningkatkan distribusi pangan;
- 6) merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi dan saran teknis dengan instansi terkait meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi pangan, pengembangan pasar produk pangan dan "Trust Fund" untuk kepentingan Ketahanan pangan.
- 7) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Distribusi Dan Cadangan Pangan;

- 8) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Distribusi Dan Cadangan Pangan;
- 9) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
- 10) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

d. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Konsumsi Pangan, promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pengembangan Pangan Lokal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasi pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Konsumsi Pangan, promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pengembangan Pangan Lokal;
- 4) mengkoordinasi penyiapan pemantapan program di Bidang Konsumsi Pangan, promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pengembangan Pangan Lokal;
- 5) mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan sosialisasi mutu dan keamanan pangan, analisis mutu gizi, keamanan pangan dan konsumsi pangan masyarakat, pembinaan sistem jaminan mutu dan penerapan standar batas maksimum residu (BMR), serta pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima di daerah;
- 6) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Pembinaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), termasuk kegiatan lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Non Beras Bon Terigu serta gerakan makan B2SA terhadap Murid SD/MI dengan Instansi terkait;

- 7) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemantauan survey baik analisis Pola Pangan Harapan (PPH) maupun analisis Angka Kecukupan Gizi (AKG),serta pola konsumsi pangan dengan instansi terkait;
- 8) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 9) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 10) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
- 11) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

e. Bidang Keamanan Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- 4) mengkoordinasikan pemantapan program di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- 5) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Keamanan Pangan;

- 6) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Keamanan Pangan;
- 7) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keamanan Pangan; dan
- 8) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

9) **Kelompok Jabatan Fungsional;**

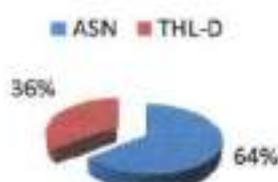
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada awal Tahun 2017 didukung oleh sebanyak 84 orang pegawai yang terdiri dari ASN sebanyak 54 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah sebanyak 30 orang, untuk melihat perbandingan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Komposisi Pegawai Berdasarkan jenis Kepegawaian



Gambar 2. 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Tahun 2017 berjumlah 54 orang. Penjelasan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. ASN Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Tingkat Pendidikan

No.	Pangkat dan Golongan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	-	1	-	-	-	-	1
2	Pembina Tk. I Gol. IV/b	-	1	-	-	-	-	1
3	Pembina Gol. IV/a	3	7	-	-	-	-	10
4	Penata Tk. I Gol. III/d	2	4	-	1	-	-	7
5	Penata Gol. III/c	3	4	-	-	-	-	7
6	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	2	7	-	-	-	-	9
7	Penata Muda Gol. III/a	-	4	-	-	-	-	4
8	Pengatur Tk. I Gol. II/d	-	-	-	1	-	-	1
9	Pengatur Gol. II/c	-	-	-	9	-	-	9
10	Pengatur Muda Tk. I Gol. II/b	-	-	-	4	-	-	4
11	Pengatur Muda Gol. II/a	-	-	-	-	1	-	1
12	Juru Tk. I Gol. I/d	-	-	-	-	-	-	0
13	Juru Gol. I/c	-	-	-	-	-	-	0
14	Juru Muda Tk. I Gol. I/b	-	-	-	-	-	-	0
15	Juru Muda Gol. I/a	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	10	28	0	15	1	0	54

Tenaga Harian Lepas Daerah (THLD) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Tahun 2017 berjumlah 30 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan Tenaga Harian Lepas Daerah (THL-D) di lingkungan Dinas Ketahanan sebagian besar

berpendidikan SLTA sebanyak 18 orang atau 60 %, sedangkan urutan kedua THL-D dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 9 orang atau 30 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Komposisi THL-D Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2. 3. Komposisi THL-D Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gender, maka pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal tahun 2017 adalah sebagai berikut : pegawai berstatus ASN berkelamin laki-laki sebanyak 32 orang atau 59 %, berkelamin perempuan sebanyak 22 orang atau 41 %, sedangkan pegawai berstatus THL-D berkelamin laki-laki sebanyak 10 orang atau 33 %, sedangkan berkelamin perempuan sebanyak 20 orang atau 67 %. Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan awal tahun 2017 berdasarkan Gender dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender



Gambar 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

2. Aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menempati pada Gedung Kembar B Lantai 2 yang terletak di kompleks perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Jl. Woltermonginsidi Tenggarong.

Selain Gedung yang ditempati, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sejumlah aset yang tercatat dalam SIMDA BMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal tahun 2017 sebesar Rp. 9.190.783.330,00 (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), meliputi Bangunan Gedung, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya, Kontruksi Dalam Pengerjaan.

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Bangunan Gedung	1,902,772,952,00
2	Peralatan dan Mesin	6,680,401,028,00
3	Aset Tetap Lainnya	10,000,000,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	597,609,350,00
Total Nilai aset Per 31 Desember 2016		9,190,783,330,00

Untuk menunjang kegiatan operasional pegawai struktural Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir Tahun 2016 memiliki kendaraan dinas baik mobil dinas maupun sepeda motor dinas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

No.	Merk Kendaraan	Jumlah	Tahun	Sumber	Keterangan
1.	Mobil Dinas				
	Nissan Navara	2 unit	2012/2013	APBD	baik
	Strada Triton	1 unit	2008	APBD	baik
	Toyota Innova	2 unit	2006/2008	APBD	baik
	Ford	1 unit	2005	APBD	baik
2.	Sepeda Motor				
	Yamaha Vixon	1 unit	2013	APBD	baik
	Honda Supra X	16 unit	2010	APBD	baik
	Honda Mega Pro	4 unit	2010	APBD	baik
	Yamaha Vixon	2 unit	2010	APBD	baik
	Honda Revo	4 unit	2007	APBD	baik

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir Tahun 2016 meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Sumber	Keterangan
1.	Note Book	23	APBD	
2.	Wirelles	4	APBD	
3.	Proyektor/LCD	8	APBD	
4.	Faximile	2	APBD	
5.	Wifi	1	APBD	
6.	Kamera Digital	12	APBD	
7.	Handy Came	2	APBD	
8.	Handy Talky	10	APBD	
9.	Sound system	1	APBD	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota.

Indikator SPM untuk Kabupaten Kota ada 7 (Tujuh) Indikator sebagai berikut :

- a. Ketersediaan energi dan protein per kapita
- b. Penguatan Cadangan Pangan
- c. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah
- d. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
- e. Peningkatan Skor Pola Pangan harapan (PPH)
- f. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
- g. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dari Indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dalam tabel 2.4 (**Tabel TC 23**) berikut :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TABEL TC - 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	Indikator Kinerja Utama Dengan Target dan Pengukuran Daerah	TARGET RUPK (R)	TARGET ROR (R)	TARGET ROR LAINNYA (R)	Target Berbasis Pengetik Daerah					Indikator Capaian Tahunan					Rendah Capaian Pada Tahunan					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Calakan Logistik Pertanian							1 - tercapai						1 - tercapai					100,00	100,00
1	Proses dan Berproduksi pangan dan ternak (N)	2,50	2,50	3,72	3,25,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%	3,30,71%
1	Perbaikan lahan pertanian (N)				10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
4	Perbaikan lahan pertanian (N)				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
5	Kelembagaan petani (N)				1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai
6	Kelembagaan petani (N)				1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai	1 - tercapai
7	Kelembagaan petani (N)	28,27%	28,27%	30,75%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%	28,27%
8	Kelembagaan petani (N)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
9	Kelembagaan petani (N)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
10	Kelembagaan petani (N)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
11	Kelembagaan petani (N)																			
12	Kelembagaan petani (N)	80%	80%	87%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Dari tabel TC 23 diatas, mencerminkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa target indikator yang telah tercapai dan ada yang belum tercapai.

Ketersediaan dan Kerawanan pangan

Ketersediaan pangan, terutama pangan pokok beras di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan pada tahun 2015 tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi jumlah kebutuhan konsumsi beras penduduk dan bahkan surplus beras. Kontribusi produksi padi terhadap produksi padi Provinsi Kalimantan Timur mencapai sekitar 48,75%.

Ketersediaan pangan beras diperoleh dari sumber produksi produksi dalam daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah produksi 186.830 ton dan siap konsumsi berupa beras sebesar 117.217 ton (asumsi konversi gabah kering giling ke padi 62,74), kebutuhan untuk jumlah penduduk 717.789 jiwa (BPS) sebesar 81.110 ton (asumsi kebutuhan perkapita 113 kg), dan surplus sebesar 36.107 ton. Surplus beras terdapat di 10 wilayah kecamatan (3 terbesar surplus di Kec.Tenggarong Seberang 18.424 ton; Loa Kulu 16.017 ton; Sebulu 4.658 ton), Sedangkan wilayah minus terdapat di 8 kecamatan (3 terbesar minus di Kec. Sanga-sanga 1.808 ton; Tabang 7.869 ton; Muara Jawa 45.578 ton).

Surplus beras yang terjadi dikarenakan adanya peningkatan luas panen (termasuk cetak sawah baru), intensifikasi (termasuk perbaikan irigasi) dan tidak adanya gangguan yang signifikan baik hama maupun penyakit serta gangguan alam lainnya terhadap tanaman padi petani. Adapun penurunan produksi yang terjadi utamanya pada wilayah yang sebelumnya surplus disebabkan oleh beberapa faktor antara lain oleh kekeringan disebagian besar wilayah kabupaten Kutai Kartanegara, alih fungsi lahan pertanian menjadi areal non pertanian dan pangan. Hal ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan lahan pangan produktif dan memperketat pengendalian alih fungsi lahan ke non pertanian pangan dengan mempercepat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke

dalam Perda Tata Ruang (RT-RW) sesuai amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kondisi ketersediaan pangan pokok utama beras, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubijalar di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.5. Data Ketersediaan pangan (beras) dari sumber produksi di Kab. Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	650.908	665.489	683.121	700.439	717.789
2.	Luas Tanam (ha)	42.611	35.536	42.432	36.867	37.701
	Padi Sawah	38.300	31.187	38.069	32.563	32.563
	Padi Ladang	4.311	4.349	4.363	4.304	5.138
3.	Luas Panen (ha)	43.603	41.247	41.574	39.679	39.433
	Padi Sawah	38.828	37.013	37.113	35.433	35.433
	Padi Ladang	4.780	4.234	4.461	4.246	4.000
4.	Produktivitas (kw)	48,90	49,06	49,01	48,92	49,03
	Padi Sawah	51,01	51,01	51,03	51,03	51
	Padi Ladang	31,82	31,97	32,18	32,34	32,45
5.	Produksi GKG (ton)	213.233	202.338	203.746	194.501	186.830
	Padi Sawah	198.023	188.803	189.393	180.811	173.848
	Padi Ladang	15.210	13.535	14.353	13.690	12.982
6.	Konversi ke Beras (ton)	134.764	129.294	130.194	122.029,93	117.217,04
	Padi Sawah	125.151	120.645	121.022	113.640,82	109.072,24
	Padi Ladang	9.613	8.649	9.172	8.389,11	8.144,91
7.	Prod. Siap Konsumsi(ton)	118.592	117.657	118.476	111.047,24	106.667,51
8.	Kebutuhan (ton)	73.553	76.214	76.214	50.828	81.110,16
9.	(Kurang)/Lebih (ton)	45.093	41.443	42.262	24.780	36.106
	(Kurang)/Lebih (%)	61,31	54,38	55,46	48,75	44,52
10.	% Penyediaan (%)	161,31	154,38	155,46	148,75	144,52

Sumber data : Angka Tetap (ATAP) Distan Pangan dan Hortikultura Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan :

Konversi Gabah Kering Giling (GKG) ke Beras : 62,74 % (Th.2011-2015), dan 63,90 (Th.2012-2013)

Faktor Konversi Produksi untuk Konsumsi : 9 %

Konsumsi Perkapita : 113 kg

Tabel.2. 6. Data Ketersediaan pangan (Jagung) dari sumber produksi di Kab. Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun				2015
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	650.908	665.489	683.131	700.439	717.789
2.	Luas Tanam (ha)	1.879	1.512	1.852	1.695	
3.	Luas Panen (ha)	630	581	413	245	420
4.	Produktivitas (kg)	32,40	31,92	32,48		37,52
5.	Produksi (ton)	2.041	1.855	1.342	835	1.576
6.	Prod.Siap Konsumsi(ton)	1.633	1.484	1.073	458	1.260
7.	Kebutuhan (ton)	3.111	3.224	3.366	2.158	3.431,03
8.	(Kurang)/Lebih (ton)	(1.478)	(1.740)	(2.293)	(1.700)	(2.171)
	(Kurang)/Lebih (%)	(47,51)	(53,97)	(68,14)	(78,76)	(63,27)
9.	% Penyediaan (%)	52,49	46,03	31,86	21,24	36,73

Sumber data : Angka Tetap (ATAP) Distan Pangan dan Hortikultura Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan :

Faktor Konversi Produksi untuk Konsumsi : 20%

Konsumsi Perkapita : 4,78 kg/org/tahun

Tabel.2.7.Data Ketersediaan pangan (Kedelai) dari sumber produksi di Kab. Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun				2015
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	650.908	665.489	683.131	700.439	717.789
2.	Luas Tanam (ha)	514	329	399	183	161
3.	Luas Panen (ha)	366	288	369	155	107
4.	Produktivitas (kg)	14,78	14,90	14,93	14,88	14,39
5.	Produksi (ton)	541	429	551	232	154
6.	Prod.Siap Konsumsi(ton)	454,36	360,51	462,86	194,99	129,36
7.	Kebutuhan (ton)	4.491	4.654	4.654	4.833	4.953
8.	(Kurang)/Lebih (ton)	(4.036,64)	(4.293,49)	(4.191,14)	(4.638,01)	(4.823)
	(Kurang)/Lebih (%)	(89,89)	(92,26)	(90,06)	(95,97)	(97,39)
9.	% Penyediaan (%)	10,11	7,74	9,94	4,03	2,61

Sumber data : Angka Tetap (ATAP) Distan Pangan dan Hortikultura Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan :

Faktor Konversi Produksi untuk Konsumsi : 16%

Konsumsi Perkapita : 6,90 kg/org/tahun

Tabel.2.8. Data Ketersediaan pangan (Ubi Kayu) dari sumber produksi di Kab. Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun				2015
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	650.908	665.489	683.131	700.439	717.789
2.	Luas Tanam (ha)	1.314	1.039	1.233	1.052	1034
3.	Luas Panen (ha)	1.237	904	1.152	1.161	958
4.	Produktivitas (kw)	142,40	169,20	182,53	110	226,52
5.	Produksi (ton)	17.614	15.296	21.027	12.782	21.701
6.	Prod.Siap Konsumsi(ton)	14.443	12.543	17.243	10.481	17.794
7.	Kebutuhan (ton)	8.084	8.377	8.750	5.612	8.914
8.	(Kurang)/Lebih (ton)	6.359	4.166	8.493	4.869	8.880
	(Kurang)/Lebih (%)	78,66	49,74	97,07	86,76	99,61
9.	% Penyediaan (%)	178,66	149,74	197,07	186,76	199,61

Sumber data : Angka Tetap (ATAP) Distan Pangan dan Hortikultura Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan :

Faktor Konversi Produksi untuk Konsumsi : 18%

Konsumsi Perkapita : 12,42 kg/org/tahun

Tabel.2.9. Data Ketersediaan pangan (Ubi Jalar) dari sumber produksi di Kab. Kutai Kartanegara

No	Uraian	Tahun				2015
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	650.908	665.489	683.131	700.439	717.789
2.	Luas Tanam (ha)	593	597	639	587	
3.	Luas Panen (ha)	659	569	642	626	488
4.	Produktivitas (kw)	104,70	104,70	104,95	49,03	108,58
5.	Produksi (ton)	6.864	5.954	6.736	2.693	5.299
6.	Prod.Siap Konsumsi(ton)	6.040	5.240	5.931	2.370	4.663
7.	Kebutuhan (ton)	3.313	3.387	3.477	3.565	3.653
8.	(Kurang)/Lebih (ton)	2.727	1.853	2.454	(1.195)	1.010
	(Kurang)/Lebih (%)	82,32	54,70	70,57	(33,52)	27,64
9.	% Penyediaan (%)	182,32	154,70	170,57	66,48	127,64

Sumber data : Angka Tetap (ATAP) Distan Pangan dan Hortikultura Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan :

Faktor Konversi Produksi untuk Konsumsi : 12%

Konsumsi Perkapita : 5,09 kg/org/tahun

Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan

Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menimbulkan berbagai tantangan, dalam melakukan pendistribusian pangan ke seluruh wilayah konsumen. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak pada gangguan ketahanan pangan di wilayah yang bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup aspek prasarana dan sarana, kelembagaan pemasaran

Penguatan Cadangan Pangan masih belum terlaksana dengan baik, masih belum terisinya stock Cadangan Pangan Pemerintah untuk menanggulangi gejala Rawan Pangan, serta masih belum optimalnya keberadaan Lembaga Cadangan Pangan, dimana jumlah Lumbung Pangan Masyarakat masih sangat terbatas serta belum berperan secara optimal sebagai penyangga cadangan pangan.

Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Keragaman konsumsi pangan masyarakat akan mempengaruhi indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan skor mutu konsumsi pangan penduduk. Untuk meningkatkan mutu konsumsi pangan penduduk perlu adanya peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman melalui berbagai upaya yang dapat memotivasi dan mendorong masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, pembinaan, promosi dan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung terlaksananya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada tahun 2015 diantaranya adalah : Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MK-RPL), Lomba

Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal, Sosialisasi Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi Murid Sekolah Dasar, Ibu Hamil dan Menyusui.

Ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras merupakan masalah klasik yang lambat laun dapat mengancam ketahanan pangan, untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan upaya diversifikasi bahan pangan yang diharapkan dapat menurunkan konsumsi beras per kapita per hari. Selain itu diharapkan dengan diversifikasi dan peningkatan keragaman bahan pangan maka perbaikan gizi masyarakat dapat tercapai.

Pola Konsumsi Pangan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- Konsumsi umbi-umbian berdasarkan data masih dibawah batas ideal;
- Konsumsi Kacang-Kacangan masih dibawah batas ideal ;
- Konsumsi gula masih melebihi batas ideal;
- Konsumsi pangan segar dan buah masih dibawah ideal ;
- Skor PPH diperoleh sebesar 91,30

Keamanan Pangan

Nilai dari Standar Pelayanan Minimal untuk Penanganan Keamanan Pangan ditargetkan pada tahun 2015 adalah sebesar 80 %, sedangkan hasil uji dilapangan baik dengan Rapid Test Kit maupun uji Laboratorium menunjukkan sebesar 99,39 % berarti untuk Pelayanan Penanganan Keamanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong baik

Dari tahun ke tahun, pendanaan pelayanan daerah tidak continue dan cenderung mengalami penurunan, hanya ada beberapa kegiatan dalam satu periode renstra yang tersedia pendanaannya, diantaranya kegiatan Pengananan Daerah Rawan pangan dan Survey Pola Pangan Harapan, sementara untuk beberapa kegiatan yang lain silih berganti dari tahun ke tahun. Ada beberapa kegiatan yang sangat menunjang tercapainya indicator pelayanan Perangkat Daerah namun tidak tersedia pendanaannya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, baik dalam ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, dan pola konsumsi pangan, dan keamanan pangan, adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tanaman pangan;
2. Masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen;
3. Permintaan pangan semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan baku industri pengolahan pangan, dan parawisata;
4. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok
5. Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus gizi kurang/buruk diwilayah tertentu;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen antar wilayah, menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan, akibatnya kenaikan harga dan penurunan kualitas konsumsi pangan;
7. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional
8. Belum optimalnya pemantauan distribusi pangan antar kecamatan dan antar kabupaten.
9. Banyaknya pintu gerbang keluar-masuk barang/pangan yang tidak mendapatkan penjagaan.
10. Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan up to date yang berkaitan dengan ketersediaan, harga pangan dan cadangan pangan.
11. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang seimbang, beragam dan aman dikonsumsi;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, baik dalam ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, dan pola konsumsi pangan, dan keamanan pangan, adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tanaman pangan;
2. Masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen;
3. Permintaan pangan semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan baku industri pengolahan pangan, dan pariwisata;
4. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok
5. Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus gizi kurang/buruk diwilayah tertentu;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen antar wilayah, menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan, akibatnya kenaikan harga dan penurunan kualitas konsumsi pangan;
7. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional
8. Belum optimalnya pemantauan distribusi pangan antar kecamatan dan antar kabupaten.
9. Banyaknya pintu gerbang keluar-masuk barang/pangan yang tidak mendapatkan penjagaan.
10. Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan up to date yang berkaitan dengan ketersediaan, harga pangan dan cadangan pangan.
11. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang seimbang, beragam dan aman dikonsumsi;

12. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum.
13. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan informasi pengolahan pangan lokal;
14. Pengaruh nilai-nilai budaya dan kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
15. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap keamanan pangan segar;
16. Belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet.
17. Cara-cara budidaya dan produksi pangan yang baik dan benar belum dipahami dan diterapkan;
18. Belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
19. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan pangan yang beredar
20. Tidak tersedia dan terbatasnya Laboratorium yang terakreditasi di daerah;
21. Kurangnya koordinasi instansi terkait dalam pemantauan dan pengawasan keamanan pangan;
22. Kurangnya kesadaran pihak pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

Dalam mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong secara optimal pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Adapun peluang dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan, baik dalam ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, dan pola konsumsi pangan, dan keamanan pangan, adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadinya koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, dan pola konsumsi pangan, dan keamanan pangan
2. Sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, dan pola konsumsi pangan, dan keamanan pangan
3. Adanya kebijakan kemandirian pangan pada desa rawan pangan;
4. Adanya akses pangan wilayah dan rumah tangga, serta perseorangan.
5. Telah terjalinnya koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah;
6. Telah adanya kebijakan yang mendukung pengembangan system distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan;
7. Telah berkembangnya kelembagaan distribusi pangan masyarakat ;
8. Telah berkembangnya sistem cadangan pangan masyarakat dan pemerintah.
9. Telah berkembangnya kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
10. Meningkatnya Peran penyuluh dalam memasyarakatkan penganeekaragaman dan diversifikasi pangan;
11. Masih kurangnya Pengetahuan dan keterampilan masyarakat didalam pengolahan pangan;
12. Tingginya komitmen dari Pimpinan Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan;
13. Telah tersedianya pedoman teknis, standart, prosedur dan kebijakan/aturan perundangan;
14. Tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang cukup melimpah;
15. Sudah terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKP) Kab. Kutai Kartanegara;
16. Cukup tersedianya sumber pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal;
17. Adanya potensi lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga,
18. Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan;

2. Potensi (Peluang) Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi, dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan; dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

a. Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kutai Kartanegara dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Kutai Kartanegara memiliki potensi lahan pertanian untuk pengembangan padi, palawija dan tanaman tahunan. Potensi lahan pertanian sebesar 811.963 Ha yang terdiri dari lahan sawah diperkirakan sebesar 70.954 Ha dan lahan bukan sawah 741.009 Ha. Dari potensi yang ada untuk lahan sawah, baru dimanfaatkan sekitar 22.802 Ha (32,13 %), sedangkan lahan bukan sawah sekitar 411.172 Ha (55,49 %). Potensi lahan pertanian tersebut, tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara, dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan daerah, dan menunjang kebutuhan pangan provinsi Kalimantan Timur. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan

pangan, dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi lahan rawa dan air tanah, dan peningkatan efisiensi penggunaan air (*water efficiency*).

Populasi ternak di Kutai Kartanegara tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,76%, dari 41.308 ekor (tahun 2014) menjadi 43.374 ekor (tahun 2015). Dari jumlah tersebut, terinci ke dalam sapi potong 27.508 ekor, kerbau 3.214 ekor, kambing 8.066 ekor, dan babi 4.586 ekor. Untuk jenis unggas, pada akhir tahun 2015 menunjukkan populasi sebesar 16.885.584 ekor. Dari jumlah tersebut terinci ke dalam ayam buras, ayam potong, ayam ras petelur dan itik. Dari 4 macam unggas tersebut, populasi terbanyak adalah ayam potong sebesar 15.308.140 ekor. Jumlah sapi yang dipotong pada tahun 2015 menurut Dinas peternakan mencapai 6.573 ekor, kerbau 5 ekor, kambing 2.740 ekor, dan babi 2.385 ekor. Sedangkan hewan unggas yang dipotong mencapai 8.782.036 ekor yang terdiri atas ayam kampung 1.997.834 ekor, ayam pedaging 6.569.000 ekor, ayam petelur 186.259 ekor, dan itik 28.943 ekor. Kedepan potensi pengembangan ternak sapi terus dikembangkan, karena masih tersedianya banyak lahan yang bisa dikembangkan baik lahan khusus untuk peternakan maupun lahan eks tambang batu bara

Luas perkebunan rakyat di Kutai Kartanegara tahun 2015 adalah 60.462,15 ha dengan total produksi sebesar 265.955,52 ton. Dari berbagai komoditas perkebunan tersebut, kelapa sawit memiliki produksi terbesar yaitu 225.942,66 ton. Produksi kelapa sawit terbesar berada di kecamatan Kembang Janggut yaitu sebesar 4.764 ton, kemudian kecamatan Samboja sebesar 3.635 ton, kelapa produksi terbesar di kecamatan Muara Jawa sebesar 1.775 ton dan Lada produksi terbesar ada di kecamatan Loa Janan sebesar 2.127 ton. Potensi pengembangan perkebunan masih terbuka lebar, hal ini masih banyaknya lahan pasca tambang batu bara yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas.

Dalam hal pengembangan perikanan dan kelautan, areal tangkapan baik darat maupun laut di wilayah Kutai Kartanegara juga cukup luas, Luas Pengelolaan Laut Kalimantan Timur seluas 10.216,57 Km². Produksi perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir ini. Data *time series* menunjukkan bahwa tingkat produksi perikanan pada tahun 2010 tercatat sebesar 121.574,4 ton meningkat menjadi 141.683,3 ton pada tahun 2015. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 diketahui sebesar 64.767,9 ton naik menjadi 66.392,9 ton pada tahun 2015. Demikian pula dengan produksi perikanan budidaya dari 56.806,5 ton pada 2010 naik menjadi 75.290,4 ton pada 2015. Potensi pengembangan perikanan dan kelautan, di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) jenis perairan yaitu sungai, danau, rawa dan laut. Sungai Mahakam merupakan sungai induk dan sungai yang terpanjang, dengan panjang sekitar 920 kilometer, sedang untuk danau berjumlah sekitar 17 buah. Danau-danau yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penghasil ikan yang paling utama, dimana luas keseluruhannya sekitar 29.000 hektar. Diantaranya terdapat 2 (dua) danau yang cukup terkenal sebagai penghasil ikan yaitu Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar dan Danau Melintang dengan luas 11.000 hektar.

Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan. Kutai Kartanegara memiliki kekayaan keragaman hayati, tanaman penghasil buah, tanaman penghasil sayuran, tanaman berumbi, dan tanaman rempah-rempah. Sumber karbohidrat lain seperti : jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu. Beberapa diantaranya dari komoditi lokal tersebut yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah di Kutai Kartanegara, juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu.

Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumber daya hayati tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk

menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah. Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian sangat penting, artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan dan energi terbarukan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas tertentu membantu Kepala Daerah dalam urusan ketersediaan dan kerawanan pangan, Distribusi dan cadangan pangan, Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketahanan pangan, yaitu :

1. Melalui Dewan Ketahanan Pangan kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan;
3. Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan;
4. Pengembangan akses pangan wilayah dan rumah tangga, serta perseorangan.

b. Distribusi dan Cadangan Pangan

Kutai Kartanegara sebagai daerah yang daratannya bergelombang dan bergunung, tidak semua daratannya dapat dijangkau melalui jalan darat, pemukiman penduduknya tersebar tidak merata, mempunyai tantangan untuk dapat mendistribusikan bahan pangan secara tepat waktu sehingga tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan tersedia setiap saat.

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing wilayah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. Potensi masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana/prasarana distribusi antara lain jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain yaitu berperan pada :

1. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah;
2. Penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan;
3. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat; serta
4. Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah.

c. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok pangan. Melalui pendekatan Pola Pangan Harapan dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam, semakin baik komposisi dan mutu gizinya, sehingga pola konsumsi pangan penduduk semakin mendekati pola konsumsi

pangan yang ideal yakni pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Kutai Kartanegara memiliki beberapa peluang dalam peningkatan konsumsi, dan keamanan pangan diantaranya adalah dengan adanya kekayaan sumber daya alam yang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik.

Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu, terdapat pula berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa, dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya). Kelembagaan ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada :

1. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;

2. Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta
3. Pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
4. Meningkatkan peran penyuluh didalam memasyarakatkan penganekaragaman dan diversifikasi pangan;
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani didalam pengolahan pangan;

d. Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pangan dan tersediannya pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu pangan segar maupun pangan olahan seperti pangan olahan hasil pertanian dan jajanan anak sekolah, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan, aktivitas dan produktifitas masyarakat.

Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk meningkatkan keamanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara kita memiliki kelembagaan yang menangani keamanan pangan yang kapasitas dan kapabilitasnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mampu dalam penanganan keamanan pangan.

Penanganan Keamanan Pangan merupakan aspek yang luas melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya, oleh karena itu harus ditangani secara bersama-sama oleh pelaku usaha pangan, pemerintah dan konsumen. Kemitraan dan jaringan kerja yang erat antara instansi sebagai stakeholder baik antara instansi Pemerintah Kabupaten

maupun Pemerintah Provinsi yang menangani keamanan pangan dengan pelaku usaha pangan diperlukan dan sangat penting.

Pelaksanaan Uji Laboratorium bekerjasama dengan pihak Balai Besar POM Samarinda untuk uji sampel pangan jajanan anak sekolah dan Pangan Olahan Hasil Pertanian, sedangkan untuk Uji Laboratorium Pangan Segar dengan Pihak PT. Mutu Agung Lestari Depok Jakarta. Sejumlah sampel Pangan Segar yang diambil di 7 (tujuh) Kecamatan melalui uji Rapid Test Kit (Pesticide Test Kit) yang dilakukan oleh BKPP Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 32 sampel hasilnya dinyatakan negatif (aman untuk dikonsumsi). Uji Pangan Segar dan Olahan Hasil Pertanian yang dilakukan oleh BKPP Provinsi Kalimantan Timur dan BKPP Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pengambilan sampel sebanyak 13 sampel Pangan Segar dan 6 (enam) sampel Pangan Olahan Hasil Pertanian dengan lokasi pengambilan sampel Pasar Tangga Arung Kecamatan Tenggarong menggunakan Uji Rapid Test Kit dengan parameter Pestisida 13 sampel, Formalin 7 sampel, Borak 5 sampel, Logam Berat Timbal 5 sampel, Pemutih 2 sampel dan Pewarna 1 sampel, hasilnya Pangan Segar (kolong kaling) positif menggunakan pemutih sedangkan yang lainnya hasilnya negatif. Uji Laboratorium Pangan Segar dan Olahan Hasil Pertanian yang di Uji oleh PT Mutu agung Lestari sebanyak 16 sampel (15 sampel uji pestisida dan 1 sampel uji formalin) hasilnya negatif. Sedangkan uji pada Balai Besar POM Samarinda, uji sampel Olahan Hasil Pertanian sebanyak 46 sampel dengan parameter Borak 30 sampel, Formalin 17 sampel, Pewarna Rhodamin B 12 sampel, Pewarna Methil Yellow 5 sampel, Pestisida 4 sampel dan Uji Pemanis/Siklamat 5 sampel dengan hasil uji negatif. Kemudian uji sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah sebanyak 52 sampel dengan parameter Borak 41 sampel, Formalin 14 sampel, Pewarna Rhodamin B 8 sampel, Pewarna Methil Yellow 2 sampel dan uji Pemanis/Siklamat 6 sampel.

Dari hasil uji baik dengan Rapid Test Kit maupun melalui uji Laboratorium yang dilakukan oleh PT. Mutuagung Lestari Depok Jakarta dan

Balai Besar POM Samarinda melalui uji Pestisida, Borak, Formalin, Pewarna Rhodamin B, Pewarna Methil Yellow, Pemutih dan uji Pemanis/Siklamat menunjukkan ada 1 sampel pangan segar (kolong kaling) yang dinyatakan positif menggunakan Pemutih, artinya sebanyak 1 sampel (0,61%) dinyatakan kandungan pestisidanya/bahan kimianya melebihi Batas Minimal Residu (BMR). Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 99,39 % sampel baik Pangan Segar, Olahan Hasil Pertanian dan Jajanan Anak Sekolah dinyatakan negatif atau dinyatakan aman dari kandungan pestisida atau bahan kimia.

Nilai dari Standar Pelayanan Minimal untuk Penanganan Keamanan Pangan ditargetkan pada tahun 2015 adalah sebesar 80 %, sedangkan hasil uji lapangan baik dengan Rapid Test Kit maupun uji Laboratorium menunjukkan sebesar 99,39 % berarti untuk Pelayanan Penanganan Keamanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara baik.

BAB. III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah untuk menemukenali hasil inventarisasi permasalahan yang dikelompokkan pada permasalahan pokok. Guna identifikasi permasalahan ini adalah, sebagai acuan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat terkait dengan efektivitas peran lembaga dalam mendukung suksesnya tujuan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi perseorangan, baik secara kuantitas maupun kualitas, terjangkau, merata, beragam, bergizi berimbang, dan aman. Untuk dapat memenuhi sasaran ini, maka beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah : aspek – aspek ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan (konsumsi), bidang-bidangnya tidak saja teknis penyediaan (sektoral), tetapi juga ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Persoalan ketahanan pangan bukan hanya ketersediaan, terutama pemenuhan kebutuhan daerah, tetapi juga bagaimana rumah tangga mampu menyediakan pemenuhan konsumsi keluarga, dan bagaimana perscorangan mampu memanfaatkan pangan yang tersedia secara tepat yaitu memenuhi kebutuhan pangan yang ideal, seperti tercakup dalam Pola Pangan Harapan (PPH) ideal, yaitu keseimbangan terpenuhinya kebutuhan makro, agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif dari hari ke hari. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, dipenuhi melalui konsumsi energi (karbohidrat), zat pembangun (protein hewani), dan vitamin/mineral rata-rata sebesar 2.000 kkal/kapita/hari.

Secara garis besar permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya terlihat pada tabel 3.1. (T-B 25).

Tabel. 3.1 (TR-25) Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran PD

TABEL 3.1 - 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PERINGKAT DAERAH

NO	MASALAH PRIORITAS	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan non pertanian, tingginya leruakan lingkungan akibat perubahan iklim dan bencana alam serta meningkatnya jumlah permintaan pangan yang lebih besar dan pertumbuhan ketersediaan, serta pembinaan dan pemberdayaan kemiskinan pangan pada siklus rawan pangan diabaikan pada kondisi sarana dan infrastruktur dan tenaga pendamping di lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kebutuhan Pangan yang tidak sebanding dengan meningkatnya ketersediaan pangan. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungn terhadap salah satu sumber karbohidrat (beras) sebagai makanan pokok. Masih terjadinya kerawanan pangan (mrisan) baik kronis maupun transien di wilayah tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan Ketergantungn pada salah satu sumber pangan pokok Terdapat beberapa wilayah rentan pangan dengan berbagai penyebab dan cara penanganan yang bervariasi
2	Sarana dan prasarana distribusi hasil pangan sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan belum memadai, serta keberadaan lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk LPM masih terbatas.	<ol style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LPM) serta Belum Terpentuknya Stock pangan untuk cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi gejala rawan pangan. sarana dan prasarana distribusi yang kurang memadai di wilayah tertentu menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan Ketidakstabilan harga dan rendahnya volume pemasaran hasil pangan terutama pada saat panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional 	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat yang ada masih terbatas dalam jumlah dan kemampuannya, serta belum adanya stok cadangan pangan pemerintah Pemantauan Distribusi pangan masih belum optimal di seluruh kecamatan, sehingga wilayah yang memerlukan LPPM belum terdata dengan lengkap Masih terbatasnya data dan informasi yang akurat dan up to date yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, harga pangan dan cadangan pangan
3	Kuantitas dan Kualitas Pangan Masyarakat Yang belum beragam bergizi dan seimbang dan masih tingginya konsumsi beras perkapita, serta keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal dan pengaruh globalisasi membuat pangan siap saji yang berbasis bahan impor	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi dan seimbang Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal Adanya pengaruh globalisasi in dustri pangan siap saji, dan budaya makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi beragam bergizi dan seimbang. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan akan diversifikasi konsumsi pangan (pengendalian ragam konsumsi pangan) yang masih rendah. Keterbatasan kemampuan pengolahan pangan lokal dan sarana pengolahan bahan pangan lokal yang belum memadai Belum adanya sosialisasi, promosi dan advokasi dalam pengendalian ragam konsumsi pangan melalui media yang bisa digunakan.
4	Kemampuan Pangan mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi masih rendahnya kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap keamanan pangan, serta masih banyaknya peredaran pangan yang mengandung bahan cemaran mikroba, kimia, fisik, penggunaan bahan berbahaya dan bahan pangan tambahan karena minimnya kontrol pengawasannya	<ol style="list-style-type: none"> Masih Cukup banyak Peredaran pangan yang mengandung bahan cemaran mikroba, kimia, fisik, penggunaan bahan berbahaya dan penggunaan bahan pangan tambahan. Produk lokal yang beredar masih banyak yang belum memiliki standar registrasi atau sertifikasi prima atau belum ada jaminan keamanan pangan Keterbatasan kemampuan dan kesadaran masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha pertanian tentang keamanan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat karena keterbatasan dana dan alat Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar Kelompok Tani/Pertani Produsen atau Pelaku Usaha Tani belum banyak mengetahui dan menerapkan cara-cara bertani yang baik dan benar atau GAP (Good Agriculture Practice) Kelompok kelompok tani masih banyak belum berkembang kearah produk pertanian yang berorientasi kepada jaminan keamanan pangan dan jaminan mutu pangan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun pelaku usaha pertanian terhadap keamanan pangan

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan sebagai mana tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Banyaknya lahan pertanian beralih fungsi menjadi non pertanian tanaman pangan;
2. tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
3. masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan.
4. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan.
5. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping di lapangan.
6. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan.
7. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.
8. Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
9. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi.
10. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
11. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum.
12. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

13. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
14. Belum difahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
15. Belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;
16. Belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju,
Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

MAJU : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.
- BERKEADILAN** : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/ Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

"Terwujudnya Sistem Pertanian - Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"

Sistem pertanian bioindustri : Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan

Berkelanjutan : Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi

Beragam : Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan dan selera

Pangan sehat : Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal

Produk bernilai tambah tinggi : Menciptakan produk pertanian yang mensejahterakan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah

Sumberdayalokal : Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi

Kedaulatan pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal

Kesejahteraan petani : Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur
6. pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Melalui Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berlandaskan Kedaulatan Pangan Dan Kemandirian Pangan”

Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Penganekaragaman Pangan : Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal

Sumber Daya Lokal : Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah, komoditas pangan, dan meningkatkan efisiensi

Kedaulatan Pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal

Kemandirian Pangan : Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai "*lead institution*" dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stablnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai visi yang ingin dicapai lima tahun mendatang:

“Menjadi Lembaga Tangguh dan Aspiratif Dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peran Penyuluh yang mantap”

Visi Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Timur 2013 -2018 tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

Lembaga : Formulasi kebijakan yang mendukung perencanaan, pembinaan dan pengendalian pangan

Tangguh : Tegar, jujur, dan mandiri yang bertanggungjawab

Aspiratif : Membuka diri dalam melaksanakan program dan kegiatan

Ketahanan Pangan: Meningkatkan Ketersediaan, distribusi, dan penanggulangan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan serta pemanfaatan pangan

Mantap : Berkelanjutan

Peran Penyuluh : Berilmu, terampil dan berkarakter

Sedangkan Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengenal instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya. Adapun Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018, sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan pangan pokok;
2. Mewujudkan konsumsi pangan rumah tangga beragam, bergizi, berimbang, aman dan sehat;
3. Mewujudkan penyuluhan yang profesional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara geografis, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" Bujur Timur sampai dengan 117°36'43" Bujur Timur dan 1°28'21" Lintang Utara sampai dengan 1°08'06" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km² dan luas perairan yaitu ± 4.097 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan yang terdiri dari 44 kelurahan, 185 desa definitif dan 8 desa persiapan.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah: *ultisol*, *entisol*, *histosol*, *inseptisol*, dan *mollisol*, atau menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor, terdiri dari jenis tanah: *podsolik*, *alluvial*, *andosol*, dan *renzina*. Dari hasil analisis data pokok Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 diperkirakan luas dan sebaran jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh 4 (empat) jenis tanah yaitu *organosol gley humus* 3.492,35 hektar (12,81%); *alluvial* 759.507 hektar (27,86%); kompleks *podsolid merah kuning*, *latosol* dan *litosol* 755.705 hektar (27,72 %) dan *podsolik merah kuning* 861.863 hektar (31,61 %).

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) jenis perairan yaitu sungai, danau, rawa dan laut. Sungai Mahakam merupakan sungai induk dan sungai yang terpanjang, dengan panjang sekitar 920 Kilometer. Sungai ini masih sangat berperan sebagai urat nadi transportasi terutama untuk menuju Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai, serta sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Cabang-cabang Sungai Mahakam sangat banyak dan salah satu diantaranya adalah Sungai Belayan yang bermuara di Kecamatan Kota Bangun. Anak Sungai Mahakam ini merupakan sarana transportasi utama menuju Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 14 sungai.

Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sekitar 26 buah. Danau-danau tersebut merupakan penghasil ikan yang paling utama, dimana luas keseluruhannya sekitar 29.000 hektar. Dua danau yang cukup terkenal sebagai penghasil ikan adalah Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar dan Danau Melintang dengan luas 11.000 hektar. Perairan berupa rawa-rawa terdiri dari rawa pasang surut (*tidalswamp*) dengan luas 299.795 hektar tesebar di kecamatan wilayah pantai (sekitar delta mahakam) dan rawa (*swamp*) seluas 269.171 hektar yang tersebar di sekitar Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, dan Kecamatan Kembang Janggut.

Iklm wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas.

Iklm di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 260 C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 500 – 700 C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 1.652-3.232 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata- rata 122-209 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau ke arah barat.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara baik itu kawasan lindung, kawasan budidaya hutan, maupun kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 3.2. Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Pemanfaatan Ruang	Luas (ha)	%
A.	Kawasan Lindung		
A.a	Hutan Lindung	2004.640	7.61
A.2	Cagar Alam	32.038	1.18
A.3	Taman Nasional	50.720	1.86
A.4	Taman Hutan Raya	52.306	1.93
	Total Kawasan Lindung	340.007	12.47
B.	Kawasan Budidaya		
B1.	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)		
	Hutan Produksi Tetap (termasuk kawasan hutan bakau/fungsi lindung)	787.676	28.89
	Hutan Produksi Terbatas	600.000	22.01
	Hutan Produksi yang dapat di konversi	50.453	2.07
	Total Kawasan Budidaya Hutan (KBK)	1.444.128	52.97
B2.	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)		
	Pertanian	81.558	2.99
	Perkebunan	307.404	14.58
	Pertambangan	378.655	13.89
	Pemukiman	19.591	0.72
	Tubuh Air (perikanan)	64.957	2.38
	Total Kawasan Budidaya	942.105	34.56
	Total Kawasan Budidaya	2.386.293	87.53
	Total (kawasan Lindung + Kawasan Budidaya)	2.726.300	100

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen eksternal organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman.

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap urusan ketahanan pangan.

Komponen lingkungan internal, yang menjadi **kekuatan (strength)**, meliputi : Memiliki jumlah SDM (aparatur) yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi ketahanan pangan, Telah memiliki sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi ketahanan pangan, Memiliki sistem informasi berupa website, Sedangkan **kelemahan (weaknesses)** internal saat ini, antara lain adalah : Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan, Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, Belum optimalnya pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, Belum optimalnya koordinasi pemangku kepentingan terkait ketahanan pangan.

Komponen lingkungan eksternal yang dapat dipandang sebagai **peluang (opportunities)**, antara lain : Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, Komitmen Kepala daerah tinggi dan adanya Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKP) Kab. Kutai Kartanegara, Tersedianya sumber pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan local, Adanya potensi lahan pertanian pangan, Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan. Sedangkan komponen eksternal yang dapat menjadi **tantangan (threats)**, antara lain adalah : Masih terdapat desa rawan pangan, Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal belum memadai, Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan, Permintaan pangan semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan baku industri pengolahan pangan, Penurunan jumlah petani dan usia produktif petani sebagai tenaga kerja di sektor pertanian.

Dengan demikian isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan yang paling utama adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan pangan selain pangan pokok. Seperti sayur dan buah-buahan masih sangat terbatas perlu untuk ditingkatkan
2. Menurunkan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilitas harga pangan pokok.
4. Belum adanya cadangan pangan pemerintah
5. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang bersumber dari pangan local
6. Perlunya meningkatkan keamanan Pangan Segar

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat wilayah, rumah tangga sampai dengan perseorangan/individu.

Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2016-2021 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan SKPD
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan
3. Meningkatkan distribusi dan cadangan Pangan
4. Meningkatkan konsumsi dan penganeekaragaman Pangan
5. Meningkatkan keamanan pangan.

Kelima tujuan strategis tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yakni melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta pemberdayaan penyuluh akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama pembangunan sosial ekonomi daerah dalam rangka menuju kemandirian pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, program – program pembangunan daerah khususnya ketahanan pangan perlu diarahkan

untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

Sasaran adalah sesuatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan melalui serangkaian program/kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja dan penetapan kinerja.

Adapun Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan SKPD dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diatas 80.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/stake holders dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.
3. Meningkatnya regulasi tentang pangan berjumlah 6 regulasi sampai dengan tahun 2021.
4. Meningkatnya ketersediaan pangan utama beras sebesar 125.311,18 ton atau 135,04 % pada akhir tahun 2021.
5. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dengan skor PPH ketersediaan 97,15 pada Tahun 2021.
6. Penurunan Jumlah penduduk rawan pangan sebesar 3 % sampai akhir tahun 2021.
7. Harga gabah kering giling (GKG) di tingkat produsen lebih tinggi dari HPP.
8. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen lebih kecil dari 5 %.
9. Prosentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras) sebanyak 25,52 % atau 60 desa sampai dengan akhir tahun 2021.

10. Peningkatan Pola Pangan konsumsi Beragam masyarakat dengan skor PPH 93 pada Tahun 2021.
11. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 50 produk pangan yang bersertifikat.
12. Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu dengan persentase 88 % pada Tahun 2021.

Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 4.1 (TC – 25) berikut :

TABEL TC - 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN BADA TAHUN KE				
				1 (2017) (5)	2 (2018) (6)	3 (2019) (7)	4 (2020) (8)	5 (2021) (9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembanguan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.	Prelibat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	64,61	70,12	80	85	87
2	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam Arti Luas.	Meningkatnya Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (PPH Ketersediaan)	130,71 92,40	131,35 94,27	132,21 95,32	133,00 96,32	133,50 97,15
			Distribusi dan Harga Pangan (Kefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			Penanganan Daerah Rawan pangan	0,34	1,16	2,30	3,30	3,50
	Meningkatkan Penganhngaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	91,90	92,20	92,50	92,80	93,00
			Pengawasan dan Fembinaan Keamanan Pangan	84	85%	85%	87%	88%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan strategi pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2017-2021 berpedoman pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan.

1. Meningkatkan penguatan terhadap kapasitas dan daya dukung kelembagaan dan infrastruktur pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Meningkatkan efektifitas regulasi sistem distribusi dan informasi harga pangan sehingga pangan terdistribusi dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lembaga usaha ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan di daerah.
4. Meningkatkan penguatan terhadap manajemen pengembangan dan ketersediaan cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga, Desa, Kabupaten.
5. Mengidentifikasi daerah rawan pangan maupun daerah berpotensi terjadinya rawan pangan serta mengupayakan pemecahannya.
6. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan kualitas pangan serta menurunkan ketergantungan terhadap pangan pokok beras.
7. Mengembangkan diversifikasi pangan melalui lahan-lahan marginal termasuk lahan pekarangan.
8. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.

1.1. Kebijakan

Kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan menjadi acuan baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan ditingkat daerah dan perseorangan.

Kebijakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan
2. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
3. Mengembangkan kelembagaan dan sarana fisik pengolahan dan pemasaran dipedesaan ;
4. Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk mengatasi gejala rawan pangan
5. Menyusun kebijakan harga pangan untuk melindungi produsen dan konsumen.
6. Meningkatkan kemampuan akses pangan rumah tangga sesuai kebutuhan jumlah, mutu, keamanan, dan keseimbangan gizi;
7. Masyarakat (LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Massa) dalam memenuhi hak atas pangan khususnya bagi kelompok kurang mampu;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Intervensi bantuan pangan dan pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat rawan pangan;
9. Mempercepat proses diversifikasi pangan kearah konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang.
10. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan

Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 5.1 (T – C 25)

TABEL TC - 26
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan		
MISI	: Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Berdaya Guna bagi Masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan
Meningkatkan produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Meningkatnya Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan, Desa Bertatus Swasembada Pangan, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Penanganan Rawan Pangan
			Peningkatan Distribusi Pangan, Stabilitas Harga Pangan dan Cadangan Pangan
	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal dan Promosi Konsumsi Pangan
			Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Kelembagaan Keamanan Pangan Serta Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program prioritas beserta kegiatannya disajikan berdasarkan identifikasi dan telaahan terhadap program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program dalam RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi prioritas utama dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021, sehingga sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat diwujudkan.

Rencana program dalam Renstra Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 terdiri dari 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Layanan
6. Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan
7. Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Masyarakat.

Adapun rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 (T – C 27) dibawah ini.

Kategori	Subkategori	Kode	Program / Kegiatan	Materi Pokok / Submateri Pokok / Kegiatan Pokok	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kumulatif (2017-2021)	Perkiraan Biaya (Rp)	Perkiraan Jumlah Pegawai (orang)						
					Anggaran	SDG	Anggaran	SDG	Anggaran	SDG	Anggaran	SDG											
Monev	Monev	Monev	Monev	Monev	Monev	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000					
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000		
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000		
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
Monev	Monev	Monev	Monev	Monev	Monev	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000				
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000		
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000		
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
						1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada TABEL 7.1 (T-C 28) di bawah ini

TABEL TC - 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA TAHUN (0)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Regulasi Ketahanan Pangan	1 Regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi			1 Regulasi
2	Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)	128,73	130,71%	131,35%	132,21%	133,29%	135,04%	135,04
3	Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras) (%)	19,83 (47 Desa)	21,94% (52 Desa)	22,78% (54 Desa)	23,62% (56 Desa)	24,47% (58 Desa)	25,52% (60 Desa)	25,52% (60 Desa)
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,28	92,04	94,27	95,32	96,32	97,15	97,15
5	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/tahun)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
6	Penguatan Cadangan Pangan	0				25 Ton Beras	50 Ton Beras	75 Ton Beras
7	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	> HPP	> HPP	> HPP	> HPP	> HPP	> HPP	> HPP
8	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV)	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
9	Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,30	91,90	92,30	92,50	92,80	93,00	93
10	Konsumsi Energi (kcal/kgp/hr)	2.121	2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2150
11	Konsumsi Protein (gram/kgp/hr)	64,91	54	56,1	56,66	56,8	57,00	57
12	Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi (%)		10	10	10	10	10	50
13	Cakupan Keamanan Pangan segar (%)		84	85%	86%	87%	88%	88%

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016 -2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan disusun dengan mengacu pada:

- 1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 - 2018,
- 2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016 - 2021 ini dimaksudkan untuk peningkatan ketahanan pangan, sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- 1) Kedaulatan pangan yang berkelanjutan,
- 2) Konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan seimbang
- 3) Keamanan pangan segar masyarakat,

Selain itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan serta sebagai rambu rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tenggarong, 10 Desember 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

IR. HAIRIL ANWAR, MSi

NIP. 196003711988021001